

## Implementasi Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan APBN di Direktorat Jenderal

Haryanto, Triyuni Soemartono, T. Herry Rachmatsyah

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Indonesia  
E-Mail Korespondensi: haryanto.keuda@gmail.com

**Abstract** - *This study aims to conduct an in-depth evaluation of the implementation of digitalization policies in state financial management through the application of the Institutional-Level Financial Application System (SAKTI) within the Directorate General of Regional Financial Development. This initiative is intended to enhance transparency, accountability, and efficiency in managing the State Budget (APBN). Using a descriptive qualitative approach, the study examines the implementation of SAKTI based on George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that SAKTI has had a positive impact, particularly in improving administrative efficiency, the accuracy of transaction recording, and the ease of financial monitoring and reporting. Nevertheless, several challenges persist, including communication barriers, limited resources, and bureaucratic resistance. Therefore, it is necessary to strengthen policy dissemination efforts, provide continuous training for human resources, and improve technological infrastructure to ensure the more effective and sustainable implementation of SAKTI in supporting a more transparent and accountable state financial governance.*

**Keywords:** *Digitalization; Implementation; Policy; SAKTI; APBN Financial Management.*

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam pelaksanaan kebijakan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji implementasi SAKTI berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang menyoroti elemen komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan SAKTI membawa dampak positif, antara lain dalam hal efisiensi administrasi, ketepatan pencatatan transaksi, serta kemudahan dalam pemantauan dan pelaporan keuangan. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kendala komunikasi, keterbatasan sumber daya, serta hambatan birokratis. Untuk itu, diperlukan peningkatan upaya sosialisasi kebijakan, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai, serta penguatan infrastruktur teknologi agar implementasi SAKTI dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Digitalisasi; Implementasi; Kebijakan; SAKTI; Pengelolaan Keuangan APBN.

### PENDAHULUAN

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenuk), dan Kementerian Pertahanan (Kemenuk) memainkan peran strategis sebagai fondasi utama pemerintahan. Kemendagri memegang tanggung jawab atas urusan dalam negeri, termasuk pengelolaan dan pembinaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda). Direktorat ini berada di bawah

koordinasi Menteri Dalam Negeri dan memiliki fungsi ganda dalam pengelolaan keuangan negara. Selain berperan sebagai pembina dalam urusan keuangan daerah, Ditjen Bina Keuda juga termasuk dalam Unit Eselon I yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai bagian dari reformasi keuangan negara, pemanfaatan teknologi informasi memegang peranan krusial dalam memodernisasi sistem pengelolaan keuangan, sekaligus mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penerapan *e-government* menjadi strategi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) dengan karakteristik efisien, terbuka, dan bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* sebagai bentuk digitalisasi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang merupakan bagian dari IFMIS, berfungsi untuk menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan negara ke dalam satu sistem yang terintegrasi.

Transformasi ini menandai pergeseran besar dari praktik konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis digital, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ditujukan untuk mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, diwajibkan menggunakan SAKTI, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung digitalisasi di sektor keuangan. Di tengah era digital saat ini, literasi digital menjadi semakin krusial, karena kemampuan dalam mengakses dan memahami informasi berbasis digital merupakan faktor utama dalam mencapai keberhasilan (Clark, 2022).

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dimulai dengan tahap uji coba terbatas (*piloting*) pada tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015, dan secara resmi diberlakukan secara menyeluruh mulai Januari 2022 melalui PMK Nomor 171/PMK.05/2021. SAKTI merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang bertujuan menciptakan sistem perbendaharaan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 1 ayat (1) PMK 171/2021, SAKTI didefinisikan sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah, serta menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Penerapannya menggunakan pendekatan percontohan (*pilot approach*). Sebagai bagian dari *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*, SAKTI berperan sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan satuan kerja Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN. Aplikasi ini mendukung fungsi perbendaharaan dan penganggaran negara melalui berbagai modul, termasuk penganggaran, pembayaran, akuntansi, dan pelaporan, dengan menyatukan semua aplikasi satuan kerja dalam sistem yang terintegrasi. Meski bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi para pengelola keuangan yang belum familiar dengan sistem baru ini. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang memadai serta penyesuaian dalam praktik pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala lain mencakup aspek kemudahan penggunaan (*usability*) dan keterbatasan infrastruktur, yang menyebabkan sebagian pengguna mengalami kesulitan operasional, sehingga dibutuhkan peningkatan dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

Penelitian mengungkapkan bahwa penerapan *e-government* di negara-negara berkembang kerap menghadapi risiko kegagalan akibat adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Hal serupa terjadi pada sistem SAKTI, yang masih mengalami berbagai kendala teknis, termasuk tingginya frekuensi pemeliharaan (*maintenance*), sehingga dapat mengganggu efisiensi kerja para penggunanya. Berdasarkan data dari layanan *Helpdesk* HAI-DJPb, tercatat bahwa 65% dari seluruh laporan pengaduan berkaitan dengan penggunaan SAKTI, menandakan perlunya peningkatan stabilitas sistem serta perbaikan dalam kualitas layanan dukungan teknis yang lebih responsif.

Informasi mengenai frekuensi pemeliharaan Aplikasi SAKTI selama periode 2022 hingga 2024 dapat ditemukan pada Tabel I.1, yang disusun berdasarkan data dari sistem informasi HAI-DJPb dan disajikan sebagai berikut:

Tabel I.1  
Frekuensi Pemeliharaan Aplikasi SAKTI pada Periode Tahun 2022 hingga 2024

Bulan	Jumlah <i>Maintenance</i>		
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Januari	10	8	13
Februari	9	10	13
Maret	9	6	5
April	9	5	4
Mei	7	5	7
Juni	10	8	10
Juli	9	9	12
Agustus	5	8	10
September	9	11	6
Oktober	8	10	5
November	11	13	13
Desember	12	15	13
<b>Total</b>	<b>105 Kali</b>	<b>108 Kali</b>	<b>111 Kali</b>

Sumber: (Disusun oleh penulis berdasarkan data dari situs *HAI-DJPb*: <https://hai.kemenkeu.go.id>, 2024).

Walaupun menghadapi berbagai tantangan, SAKTI tetap menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan perbaikan infrastruktur, peningkatan pelatihan, serta dukungan teknis yang maksimal, diharapkan implementasi SAKTI dapat lebih efektif di seluruh instansi pemerintah. Keberhasilan penerapan suatu sistem atau aplikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kegagalan dalam penerapan sistem informasi sering kali disebabkan oleh kualitas teknis yang rendah, seperti banyaknya *bug*, kesalahan logika, kinerja aplikasi yang lambat, serta kompleksitas sistem yang menyulitkan pengguna. SAKTI dirancang untuk mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan keuangan negara, sehingga memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Penerapannya tidak hanya mencakup aspek teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan dalam proses bisnis serta penyesuaian sumber daya manusia di berbagai unit kerja Kementerian/Lembaga. Tantangan utama terletak pada penyesuaian kebutuhan dari berbagai entitas yang memiliki karakteristik dan volume transaksi yang berbeda-beda. Meskipun telah membawa kemajuan dalam modernisasi pengelolaan keuangan negara, pengembangan dan implementasi SAKTI

adalah proses yang terus berlanjut. Dukungan dari pemerintah, pengguna, dan pengembang sangat diperlukan untuk memastikan sistem ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal. Keberhasilan implementasi SAKTI sangat bergantung pada penerimaan pengguna, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan efektivitas sistem ini. Keberhasilan penerapan sistem informasi dapat dicapai melalui pendekatan yang mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni manusia, organisasi, dan teknologi, serta hubungan antara ketiganya (Tawar et al., 2022).

### 1. Tinjauan Pustaka

Teori pada dasarnya berfungsi sebagai dasar acuan dalam suatu penelitian. Menurut Wiersma & Jurs dalam Sugiyono (2012, hal. 52), teori merupakan kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Dalam penelitian ini, beberapa teori yang digunakan untuk menguraikan permasalahan dan fenomena terkait diambil dari berbagai perspektif, antara lain mengenai implementasi, kebijakan, sistem informasi, SAKTI, dan pengelolaan APBN.

### 2. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan dari suatu rencana, gagasan, atau ide yang telah disusun dengan rinci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan pandangan Ripley & Franklin yang dikutip oleh Winarno (2012, p. 148), implementasi adalah peristiwa yang terjadi setelah suatu Undang-undang disahkan, yang memberikan otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat (*benefit*), atau hasil nyata (*tangible output*). Selain itu, istilah implementasi lebih merujuk pada proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan program, di mana hasil dari kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor, terutama para birokrat, untuk memastikan agar program dapat berjalan sesuai rencana. Beberapa definisi dan teori tentang implementasi mengarah pada kesimpulan bahwa implementasi adalah praktik kebijakan atau proses pelaksanaan yang dirancang oleh pembuat kebijakan dengan tujuan mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, implementasi mencakup tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan; dan (3) adanya hasil dari kegiatan tersebut (Agustino, 2012, p. 139).

### 3. Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan dipahami sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi dasar serta pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan (terutama dalam konteks pemerintahan, organisasi, dll). Istilah ini dapat diterapkan pada berbagai sektor, baik pemerintahan, organisasi, sektor swasta, maupun individu. Dengan demikian, kebijakan dapat didefinisikan sebagai alat untuk mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan demi kepentingan umum (Winarno, 2020).

Selain itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan evaluasi, yang menurut Anderson (dalam Islamy, 2023) didefinisikan sebagai proses penilaian yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi kebijakan dianggap sebagai bagian penting dari seluruh proses kebijakan, yang tidak hanya dilakukan di tahap akhir, tetapi juga sepanjang proses kebijakan berlangsung. Evaluasi melibatkan dua aspek yang saling

terkait, di mana salah satunya memiliki peran penting dalam mengukur hasil kebijakan publik, program, dan sebagai sarana untuk menentukan sejauh mana kebijakan tersebut bermanfaat bagi kelompok tertentu.

#### 4. Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari dua kata, di mana "sistem" merujuk pada sekumpulan komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, "informasi" diartikan sebagai data yang telah diproses dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki makna dan berguna bagi penerimanya. Dengan demikian, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai gabungan antara orang, data, yang saling berkolaborasi dan berinteraksi untuk mengolah serta mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi organisasi (Kenneth & Laudon, 2020, hal. 15).

#### 5. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari tingkat instansi yang lebih tinggi hingga yang terendah. Kementerian Keuangan, sebagai penggerak utama sistem ini, menggabungkan berbagai aplikasi yang sebelumnya dijalankan secara terpisah, seperti aplikasi untuk perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Menurut Kementerian Keuangan (2023), pembentukan SAKTI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi dalam pencatatan transaksi, serta memperbaiki proses pengawasan dan pelaporan keuangan pada instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam jangka panjang.

#### 6. Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

APBN adalah alat kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN mencakup pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan negara merupakan serangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap anggaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Mardiasmo (2021), pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar dana publik dapat digunakan secara optimal.

Menurut Kementerian Keuangan (2023), berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, Pengelolaan APBN harus berlandaskan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. **Akuntabilitas:** Pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
2. **Efisiensi dan Efektivitas:** Setiap pengeluaran harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3. **Transparansi:** Penyebaran data dan informasi terkait keuangan negara harus memudahkan akses publik untuk meningkatkan kepercayaan.
4. **Kepastian Hukum:** Pengelolaan APBN harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan teknologi, digitalisasi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan APBN untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Menurut Setiawan (2022), penggunaan sistem berbasis teknologi dalam digitalisasi keuangan negara memungkinkan proses administrasi keuangan berlangsung lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Salah satu bentuk digitalisasi dalam pengelolaan APBN adalah penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap kondisi sosial yang ada, pencatatan informasi, serta wawancara dengan informan. Pendekatan induktif memungkinkan peneliti untuk menghubungkan data empiris dengan teori yang relevan, sehingga dapat menarik kesimpulan yang lebih luas. Dalam proses penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya dengan mengikuti pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan jurnal dan penelitian yang sudah ada. Proses pengolahan data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga menarik kesimpulan menurut Miles et al., dalam Elwan et al., (2022). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai implementasi SAKTI serta rekomendasi untuk peningkatan implementasinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mencakup kumpulan fakta, data, dan informasi yang disajikan secara objektif, sesuai dengan fenomena yang ditemukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan berdasarkan judul penelitian yang telah ditetapkan, yaitu: "Implementasi Program Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri".

Penerapan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan APBN. Implementasi sistem ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 sebagai acuan hukum utama. Peneliti telah melakukan wawancara di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai dasar. Hasil wawancara tersebut memberikan informasi terkait pelaksanaan Program Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Dirjen Bina Keuda Kemendagri. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edwards III, yang mencakup empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2012, hlm. 149). Uraian hasil wawancara dan observasi terhadap masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

### **a. Indikator Komunikasi**

Komunikasi merupakan elemen fundamental yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena kesalahan dalam penyampaian informasi atau ketidaksesuaian sumber informasi dapat mengakibatkan kegagalan kebijakan. Dalam konteks implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting. Mengingat kompleksitas sistem SAKTI yang melibatkan banyak pihak, diperlukan komunikasi yang jelas dan efektif untuk menunjang keberhasilan penerapannya. Keberhasilan penggunaan SAKTI di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat ditentukan oleh seberapa baik komunikasi terjalin antara para pelaksana kebijakan dan pengguna sistem. Komunikasi yang efektif dapat menciptakan kesamaan persepsi, meminimalkan kesalahpahaman, serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pelaksana kebijakan dan para pemangku kepentingan pengguna aplikasi SAKTI. Kendala ini muncul akibat perbedaan persepsi, harapan yang tidak sejalan, serta keterbatasan dalam pelatihan dan koordinasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan kepada pengguna SAKTI melalui forum-forum yang diselenggarakan secara langsung maupun daring. Strategi ini diperkuat dengan penyediaan dukungan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala untuk memastikan kelancaran dan efektivitas implementasi SAKTI.

Di samping itu, implementasi SAKTI ditujukan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui penggunaan sistem ini, pelaksanaan administrasi keuangan menjadi lebih cepat, risiko kesalahan akibat faktor manusia dapat diminimalkan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara.

Berdasarkan hasil wawancara, aspek komunikasi terbukti menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Mengingat sistem ini bersifat kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diperlukan komunikasi yang jelas dan efektif agar seluruh pihak dapat memahami tujuan, manfaat, serta mekanisme penggunaan aplikasi tersebut. Dengan adanya komunikasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan partisipatif, pelaksanaan SAKTI dapat lebih maksimal dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam penerapan SAKTI di lingkungan Ditjen KEUDA telah terlaksana dengan baik.

### **b. Indikator Sumberdaya**

Menurut Edward III, indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa unsur penting, yaitu: (a) tenaga kerja; (b) fasilitas; (c) informasi; dan (d) kewenangan. Dalam konteks penerapan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, indikator ini mencakup aspek sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta alokasi anggaran. Sumber daya manusia memegang peranan penting, namun masih terdapat kekurangan dalam jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional pengelola keuangan APBN dan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Di sisi lain, infrastruktur juga menghadapi tantangan seperti perangkat keras yang sudah tidak optimal, akses internet yang belum stabil, serta terbatasnya ruang penyimpanan arsip. Sementara itu, anggaran untuk pelaksanaan

SAKTI telah dimasukkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 yang meliputi kegiatan pelatihan dan koordinasi, namun dukungan untuk perbaikan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut, Edward III dalam Widodo (2010, hlm. 103) menyatakan bahwa pelaksana kebijakan harus diberikan kewenangan yang memadai untuk membuat keputusan dalam menjalankan kebijakan sesuai tugasnya. Meskipun kewenangan telah diatur melalui Surat Keputusan, implementasi SAKTI masih menemui beberapa kendala. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, penyediaan fasilitas yang layak, serta penguatan anggaran untuk mendukung penerapan sistem ini secara maksimal, sehingga tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dapat tercapai.

### **c. Indikator Disposisi**

Disposisi merujuk pada kesiapan dan kesediaan para pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan publik secara optimal. Aspek ini mencakup motivasi, komitmen, dan kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks penerapan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sikap dan orientasi para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Disposisi yang kuat ditandai dengan komitmen tinggi, antusiasme, serta integritas dari pimpinan hingga staf pelaksana menjadi kunci dalam mendukung efektivitas sistem. Selain itu, pemilihan aparatur yang profesional dan pemberian insentif yang tepat turut berkontribusi dalam membangun semangat kerja dan keberhasilan implementasi kebijakan SAKTI.

Sejak implementasi penuh pada tahun 2022, SAKTI telah mendorong perubahan perilaku pengguna menuju pengelolaan keuangan berbasis digital. Komitmen pimpinan tercermin dari arahan untuk mengoptimalkan seluruh fitur dalam aplikasi SAKTI serta melalui kampanye "KEUDA Digital". Walaupun sebagian besar pengguna menunjukkan respons positif terhadap sistem ini, evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas pemberian insentif masih diperlukan untuk memastikan motivasi dan keterlibatan tetap terjaga. Secara umum, aspek disposisi dalam penerapan SAKTI telah terlaksana dengan baik, ditandai oleh komitmen kuat dari pelaksana, penyelenggaraan pelatihan yang memadai, serta semangat kerja yang tinggi. Hal ini turut berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang berbasis digital dan akuntabel.

### **d. Indikator Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memegang peran krusial dalam mendukung keberhasilan penerapan SAKTI, yang mencakup dua komponen utama: Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. SOP telah diterapkan melalui modul dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun demikian, kompleksitas prosedur masih menjadi hambatan yang perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Sementara itu, fragmentasi dalam sistem SAKTI diwujudkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang menetapkan batas kewenangan antara pejabat, operator, dan administrator, sehingga pembagian tanggung jawab menjadi lebih jelas. Meski begitu, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti penolakan terhadap perubahan, kebijakan yang kerap berubah, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Walaupun Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah mengimplementasikan SOP serta struktur tugas yang terorganisir, pengawasan dan koordinasi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penyederhanaan alur kerja serta peningkatan koordinasi antara Ditjen Bina Keuda, KPPN, dan Kementerian Keuangan menjadi langkah penting untuk memperkuat efektivitas implementasi SAKTI.

## Pembahasan

Penelitian ini mengkaji implementasi SAKTI dalam pengelolaan APBN di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan hasil observasi dan wawancara. SAKTI merupakan sistem utama yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan, sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 171/PMK.05/2021 dan Permendagri Nomor 24 Tahun 2021. Sistem ini mencakup berbagai modul, seperti Penganggaran, Komitmen, Bendahara, Aset Tetap, Persediaan, Pembayaran, General Ledger, dan Pelaporan, yang mendukung pengelolaan keuangan secara komprehensif. Meskipun telah membawa kemajuan dalam efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, masih ada kebutuhan untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas pengguna, serta mengembangkan sistem yang lebih ramah pengguna. Keberhasilan implementasi SAKTI sangat bergantung pada evaluasi dan perbaikan terus-menerus, agar sistem ini tetap sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang terus berkembang. Hal ini mendukung modernisasi keuangan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

### 1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan implementasi SAKTI dalam Proses Pengelolaan Keuangan APBD pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, penelitian ini akan menggunakan kerangka kerja Edward III yang mencakup empat indikator atau variabel utama, yaitu: **komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.**

#### a. Indikator Komunikasi

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan, termasuk dalam implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Berdasarkan teori Edward III, efektivitas komunikasi dalam kebijakan ditentukan oleh tiga dimensi utama: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

1. **Transmisi** – Informasi disampaikan melalui berbagai saluran, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung (media online, sosial media, WhatsApp). Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga aktif berkoordinasi dengan stakeholder melalui pelatihan teknis, forum diskusi, serta penyediaan berbagai kanal komunikasi seperti website, email, dan telepon untuk memastikan kelancaran implementasi.
2. **Kejelasan** – Penyampaian informasi mengenai SAKTI mengikuti regulasi yang sudah jelas, seperti PMK No. 171/PMK.05/2021 dan PMK No. 158/PMK.05/2023. Meskipun tujuan kebijakan sudah ditetapkan dengan jelas, tantangan terkait pemahaman oleh pelaksana tetap ada, sehingga evaluasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk memastikan kebijakan diterapkan secara optimal.
3. **Konsistensi** – Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menjaga kontinuitas informasi melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan pembinaan rutin. Dukungan dari SDM yang kompeten serta infrastruktur yang memadai juga memastikan implementasi SAKTI berjalan lancar.

Kesimpulannya, komunikasi dalam implementasi kebijakan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri termasuk dalam kategori

baik. Hal ini didukung oleh strategi komunikasi yang efektif, kombinasi sosialisasi langsung dan digital, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang seragam di antara seluruh stakeholder. Secara keseluruhan, komunikasi yang baik, melalui kombinasi sosialisasi, pembinaan, dan penggunaan media, berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi SAKTI.

#### **b. Indikator Sumberdaya**

Keberhasilan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam pengelolaan APBN di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sumber daya yang mendukung implementasi SAKTI sudah baik, namun masih belum sepenuhnya optimal. Tiga sumber daya utama yang berperan dalam implementasi SAKTI adalah:

##### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM merupakan faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memiliki 309 ASN dan 91 tenaga kontrak, termasuk lulusan PKN STAN yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara. Meskipun demikian, jumlah pejabat fungsional APBN dan pegawai bersertifikasi perbendaharaan masih terbatas, yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sistem ini.

##### **2. Fasilitas**

Implementasi SAKTI memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat keras yang sesuai dengan spesifikasi, dan ruang penyimpanan dokumen. Saat ini, banyak perangkat keras yang sudah melewati masa penggunaannya, dan keterbatasan ruang penyimpanan menyebabkan penumpukan dokumen yang menghambat efisiensi operasional.

##### **3. Anggaran**

Sumber daya finansial dialokasikan melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang mencakup kegiatan seperti bimbingan teknis dan evaluasi SAKTI. Namun, keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan SAKTI.

Implementasi SAKTI diatur melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, yang menetapkan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sistem ini mencakup seluruh proses keuangan, dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan, dengan berbagai modul yang mendukung setiap tahap. Meskipun sudah berjalan dengan baik, masih ada kebutuhan untuk mengoptimalkan SDM, meningkatkan fasilitas, dan memperkuat dukungan anggaran guna mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri perlu fokus pada peningkatan kualitas SDM, pembaruan fasilitas, dan pengalokasian anggaran yang lebih optimal.

#### **c. Indikator Disposisi**

Disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada kesiapan dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Edward III dalam Widodo (2010, p. 104) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan sepenuh hati. Dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, disposisi tercermin dari komitmen kuat seluruh pimpinan dan staf untuk mendukung digitalisasi

dalam pengelolaan keuangan, yang sejalan dengan slogan "KEUDA Digital". Terdapat dua aspek utama dalam disposisi, yaitu:

1. **Pengangkatan Birokrat**

Pelaksana kebijakan harus memiliki kompetensi, integritas, dan loyalitas yang tinggi. Di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara telah ditempatkan untuk memastikan implementasi SAKTI berjalan secara efektif dan akuntabel. Disiplin dan tanggung jawab pegawai juga memainkan peran penting dalam kelancaran pelaksanaan kebijakan.

2. **Insentif**

Pemberian insentif, seperti Honor Pengelola Keuangan dan Honor Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023, berfungsi sebagai pendorong kinerja. Namun, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pemberian insentif dilakukan secara adil dan efektif untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung keberhasilan implementasi kebijakan digitalisasi keuangan.

Secara keseluruhan, disposisi yang positif di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung keberhasilan implementasi SAKTI, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam sistem insentif.

**d. Indikator Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Berdasarkan pendapat Edward III, meskipun sumber daya dan pemahaman pelaksana sudah memadai, efektivitas kebijakan dapat terganggu oleh ketidakefisienan dalam struktur birokrasi. Dua aspek utama yang mempengaruhi kinerja birokrasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi.

1. **Standard Operating Procedure (SOP)**

SOP berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan kebijakan, termasuk penggunaan SAKTI. Berdasarkan wawancara, seluruh proses dalam SAKTI telah mengikuti SOP, Modul, dan Juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Namun, kompleksitas prosedur dalam sistem SAKTI membutuhkan penyederhanaan agar lebih mudah dipahami oleh para pengguna.

2. **Fragmentasi**

Fragmentasi mengacu pada distribusi tanggung jawab di berbagai unit kerja yang memerlukan koordinasi yang efektif. Dalam penerapan SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, kewenangan telah ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, dengan struktur birokrasi yang jelas, mencakup peran pejabat, operator, dan administrator. Pembagian tugas berjalan dengan baik, tetapi masih ada tantangan dalam pengawasan dan koordinasi, termasuk resistensi terhadap perubahan dan ketidaksempurnaan dalam harmonisasi kebijakan.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah cukup efektif dalam pembagian tugas dan pemahaman tupoksi. Namun, pengawasan dan koordinasi perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan efektif.

## 2. Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi SAKTI dalam Proses Pengelolaan APBN pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Dalam pelaksanaan kebijakan SAKTI di Ditjen Bina Keuda, terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat proses implementasinya. Beberapa faktor tersebut antara lain:

### a. Faktor Penghambat

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menghadapi beberapa tantangan utama, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM), teknis, regulasi, dan infrastruktur. Salah satu hambatan utama adalah terbatasnya kualitas SDM, khususnya dalam pengisian jabatan Pejabat Perbendaharaan. Menurut Pasal 197 PMK Nomor 62 Tahun 2023, pejabat ini seharusnya berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan negara yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai. Namun, kenyataannya banyak jabatan ini masih diisi oleh pejabat struktural yang tidak memiliki latar belakang atau sertifikasi yang memadai.

Beberapa faktor utama yang menghambat kualitas SDM antara lain:

1. **Kurangnya SDM dengan Sertifikasi Kompetensi** – Minat pejabat perbendaharaan untuk mengikuti sertifikasi rendah karena beban kerja yang tinggi dan risiko yang besar.
2. **Minimnya Rekrutmen Pejabat Fungsional** – Pengisian jabatan lebih banyak berasal dari pejabat struktural, sementara alih jabatan ke fungsional masih terbatas.
3. **Kurangnya Pelatihan dan Bimtek** – Program pelatihan bagi pejabat perbendaharaan masih terbatas, sehingga menghambat pemahaman terhadap regulasi keuangan.
4. **Beban Kerja Tinggi** – Banyak pejabat perbendaharaan yang merangkap jabatan lain, yang mengurangi fokus pada implementasi SAKTI.
5. **Kurangnya Koordinasi Antarlembaga** – Implementasi kebijakan SDM masih terfragmentasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
6. **Faktor Struktural dan Birokrasi** – Terbatasnya kesempatan promosi serta penempatan pejabat fungsional yang tidak sesuai dengan kompetensi.

Selain masalah SDM, tantangan teknis dalam implementasi SAKTI juga cukup besar. Kompleksitas sistem SAKTI yang melibatkan banyak modul dan fitur terintegrasi menjadi kendala bagi pengguna. Perubahan regulasi yang sering terjadi juga menyulitkan dalam memahami dan menerapkan sistem dengan optimal. Faktor infrastruktur juga menjadi hambatan, terutama terkait dengan:

1. **Ketidakstabilan Jaringan Internet** – Gangguan sering terjadi, terutama saat ada lonjakan penggunaan di akhir bulan atau tahun anggaran.
2. **Keterbatasan Perangkat Keras** – Banyak perangkat yang telah melebihi masa manfaat dan belum diperbarui karena keterbatasan anggaran.

Dengan adanya perbaikan di berbagai aspek ini, diharapkan implementasi SAKTI dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.

## b. Faktor Pendukung

Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri didorong oleh berbagai faktor yang berkontribusi besar terhadap keberhasilannya. Beberapa faktor utama yang mendukung implementasi SAKTI antara lain:

1. **Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah:** Adanya peraturan yang jelas seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB), serta kebijakan internal Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan dasar hukum yang kokoh untuk pelaksanaan SAKTI
2. **Komitmen dan Dukungan Pimpinan:** Keterlibatan pimpinan dalam menetapkan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengomunikasikan secara efektif, serta memberi contoh langsung mempercepat proses implementasi SAKTI.
3. **Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Terlatih:** Keberadaan SDM yang memiliki keterampilan teknis dan fungsional dalam pengelolaan keuangan negara menjadi aset penting dalam penerapan sistem ini.
4. **Ketersediaan Anggaran Operasional dalam DIPA 2024:** Alokasi anggaran yang mencakup berbagai kebutuhan implementasi SAKTI, seperti pengadaan perangkat, pelatihan, sosialisasi, dan pemeliharaan sistem.
5. **Kemudahan Akses dan Integrasi Data:** SAKTI yang berbasis web, dengan antarmuka yang intuitif, mendukung multi-user, serta mengintegrasikan berbagai proses pengelolaan keuangan, mempermudah pengguna dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Keberhasilan implementasi SAKTI di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sangat bergantung pada adanya regulasi yang jelas, komitmen pimpinan, SDM yang terlatih, anggaran yang mencukupi, serta kemudahan akses dan integrasi data. Dukungan dari berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal, juga memegang peran penting dalam memastikan efektivitas sistem. Selain faktor teknologi, kesiapan organisasi, keterlibatan seluruh pihak, dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar SAKTI dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. Dengan strategi dan dukungan yang solid, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

## 3. Mengidentifikasi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan implementasi SAKTI dalam Proses Pengelolaan Keuangan APBN pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam peningkatan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kendala teknis masih perlu diatasi melalui upaya perbaikan yang terus-menerus. Berikut ini berbagai langkah strategis yang telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKTI di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi
  - a. Pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin dan berkala.
  - b. Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan sesuai ketentuan PMK 62 Tahun 2023.

- c. Perekrutan SDM dengan keahlian khusus di bidang keuangan negara.
- d. Penyediaan pendampingan dari tenaga ahli keuangan guna menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan standar.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Teknologi
  - a. Perbaikan kualitas jaringan internet serta pembaharuan perangkat keras.
  - b. Optimalisasi server untuk mengurangi gangguan sistem dan mempercepat proses pelaporan.
  - c. Integrasi Sistem SAKTI dengan aplikasi keuangan lainnya untuk mendukung kemudahan rekonsiliasi data.
3. Penyempurnaan SOP dan Kebijakan
  - a. Revisi SOP agar lebih sederhana dan aplikatif.
  - b. Penetapan kebijakan internal guna mempercepat adopsi sistem.
  - c. Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dalam harmonisasi regulasi dan kebijakan pendukung.
4. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan
  - a. Pelaksanaan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan mencari solusinya.
  - b. Penyusunan laporan implementasi disertai umpan balik kepada Kemenkeu.
  - c. Pembentukan tim khusus untuk penanganan teknis secara cepat dan tepat.
5. Pemberian Insentif dan Penguatan Motivasi
  - a. Pemberian Honorarium bagi pengelola keuangan sebagaimana diatur dalam PMK 49/2023.
  - b. Penghargaan bagi unit kerja atau individu yang menunjukkan kinerja baik.
  - c. Pemberian apresiasi dalam forum evaluasi dan koordinasi sebagai bentuk motivasi tambahan.

Langkah-langkah ini diimplementasikan secara konsisten untuk mendukung kelancaran SAKTI dan menjamin pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, serta efisien.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis menggunakan empat indikator implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III dalam Agustino (2012, hlm. 150)—yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tergolong dalam kategori *cukup baik*. Penilaian ini belum mencapai kategori *baik* karena masih terdapat kendala terutama pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi. Padahal, menurut model Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang

- jas dan konsisten, ketersediaan sumber daya yang mencukupi, disposisi yang mendukung, serta struktur birokrasi yang efisien dan sesuai peran.
2. Terdapat sejumlah hambatan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan SAKTI, antara lain:
    - a. **Keterbatasan SDM yang kompeten** dalam pengelolaan keuangan negara, terutama terkait sertifikasi keahlian. Meskipun jumlah pegawai mencukupi, peningkatan kualitas masih diperlukan.
    - b. **Kondisi infrastruktur yang belum optimal**, khususnya perangkat keras dan koneksi internet yang sudah usang dan membutuhkan pembaruan.
    - c. **Prosedur operasional yang kompleks**, di mana SOP dan alur kerja sistem SAKTI masih sulit dipahami dan diterapkan secara efektif oleh pengguna.
    - d. **Kurangnya koordinasi antar unit kerja**, yang berdampak pada efektivitas penerapan sistem secara keseluruhan.
  3. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendukung implementasi SAKTI, yang berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta penguatan tiga aspek utama pengelolaan keuangan negara: akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Namun demikian, tantangan yang mencakup keterbatasan SDM, infrastruktur yang belum memadai, kompleksitas prosedur, serta lemahnya koordinasi lintas unit masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Oleh karena itu, perbaikan secara berkelanjutan terus dilakukan melalui berbagai inisiatif agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2012). *Politik dan kebijakan publik*. Alfabeta.
- Anderson, J. E. (2023). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Clark, D. (2022). Digital Literacy in the Modern Age. *Journal of Information and Technology*, 10(3), 112–125.
- Islamy, M. I. (2023). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Kenneth, C. L., & Laudon, J. P. (2020). *Management information systems: Managing the digital firm* (16th ed.). Pearson.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*. Sage publications.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (2012). *Policy implementation and bureaucracy* (4th ed.). Dorsey Press.
- Setiawan, A. (2022). Digitalisasi Keuangan Negara: Percepatan, Akurasi, dan Dokumentasi dalam Administrasi Keuangan. *Jurnal Keuangan Publik*, 15(2), 45–60.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tawar, Santoso, A. F., & Salma, Y. S. (2022). Model HOT FIT dalam Manajemen Sistem Informasi. *Bincang Sains Dan Teknologi*, 1(02), 76–82. <https://doi.org/10.56741/bst.v1i02.144>
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Bayumedia.
- Winarno, B. (2020). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.